

**Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)**

TESIS

Oleh:

SRI WIDIMAHENDRATI

201720252006



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2021**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : SRI WIDIMAHENDRATI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252006

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian : 22 Juli 2021

Jakarta, 28 Juli 2021
MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN : 0319046403


Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN : 0316077604


Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.Hum.
NIDN : 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN : 0127117401


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa ;

Tesis yang berjudul :

Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 28 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



SRI WIDIMAHENDRATI

201720252006

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Judul Tesis : Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016)

Nama Mahasiswa : SRI WIDIMAHENDRATI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720252006

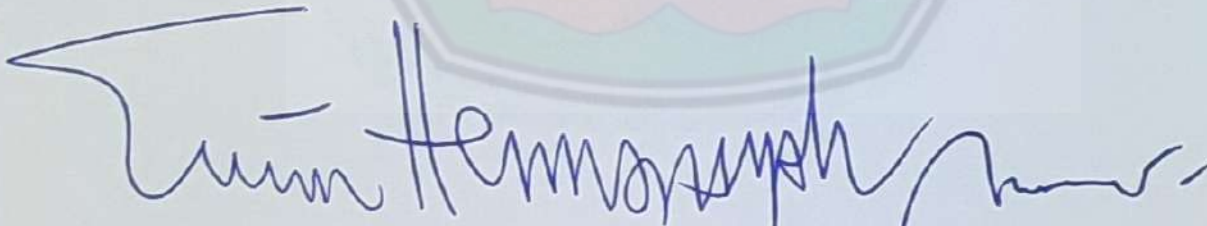
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 28 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H
NIDN : 0319046403

Dr. Noviriska, S.H., M.Hum
NIDN : 0325117405

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah	
1.2.1. Identifikasi Masalah	13
1.2.2. Rumusan Masalah	13
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1. Tujuan Penelitian	14
1.3.2. Manfaat Penelitian	14
1.4.Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran	
1.4.1. Kerangka Teori	15
1.4.2. Kerangka Pemikiran	23
1.5.Metode Penelitian	
1.5.1. Jenis Penelitian	24
1.5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.5.3. Sumber Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana.	
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	28
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana	29
2.2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	32
2.3. Perbuatan Melawan Hukum Pidana	34

2.4 Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	36
2.5 Penafsiran Hakim Terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	45
BAB III PENGERTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2 AYAT (1) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001	
3.1 Penafsiran Unsur ‘Melawan Hukum’ Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	51
3.2 Pengertian ‘ Melawan Hukum’ dalam arti materiil dengan fungsi positif	52
3.3 Pendapat Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	55
3.4 Pendapat Berdasarkan Doktrin	59
3.5 Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU Tipikor	61
BAB IV PENERAPAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP PENAFSIRAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 347 K/ PID.SUS/2016	
4.1 Peran Hakim Dalam Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.	76
4.2 Kasus Posisi Prof. Dr. IrPrawoto, M.SAE.....	88
4.3 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dilihat Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	99
4.4 Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan	111
4.5 Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi	114
4.6 Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor	116
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	124

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikumwarahmatullaahwabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis memilih judul: Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Kasus Putusan MA No.347 K/Pid.Sus/2016). Tesis ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir dalam menjalankan Pendidikan Program Studi Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam pembuatan tesis ini, tentunya penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. H. Erwin OwanHermansyah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Satu (I) Tesis.
4. Dr. Noviriska, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Dua (II) Tesis.
5. Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh CivitasAkademika yang telah berperan penting dalam proses pendidikan ini.
6. Rekan-rekan saya, Keluarga Besar Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan masukan untuk penulisan Tesis ini.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Pardiharto (alm) dan Ibu Masri'ah (almh) yang semoga selalu memberikan do'a dalam menyelesaikan pendidikan S2 ini.

8. Kepada Suami Tercinta dan 3 (tiga) anak tersayangku yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan S2 ini.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penelitian tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini, Akhirnya, seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak tesis inipun jauh dari sempurna.

Wassalaamu'alaikumwarahmatullaahwabarakaatuh.

Bekasi, 28 Juli 2021

SRI WIDIMAHENDRATI



ABSTRACT

Mochamad Nur Saefudin. 201720252007. Permasalahan Penangkapan Diduga Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Di Tinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 tahun 2003.

The author's aim is to examine the problem of arresting suspected terrorist actors by Densus 88 in terms of Law No. 5 of 2018 concerning changes to Law No. 15 of 2003, is to describe the extent to which the implementation of criminal policy in dealing with criminal acts of terrorism that do not conflict with human rights. The crime of terrorism is an extra ordinary crime so that in its prevention it is necessary to make special rules (*lex specialis*).

Problems that arise in the effort to force arrests carried out by Densus 88, very closely related to the factors conveyed according to Soerjono Soekanto, namely the legislation factor, law enforcement officials factor, facilities/facilities factor, community factor, and cultural factor. The law on criminal acts of terrorism, Law No. 15 of 2003 concerning the prevention of criminal acts of terrorism, was deemed irrelevant to the time so that the government carried out reforms with the enactment of a new law, namely Law No. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003. To minimize violations of the procedures for arresting suspected terrorists, there are several efforts made by the government, one of which is by reforming laws and enforcing the rule of law against officers who violate procedures.

This type of research is a normative juridical law research with descriptive characteristics sourced from primary data and secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials collected by means of library research. Primary data obtained by means of interviews. The data is compiled in the form of a description and then analyzed qualitatively, meaning that the data is interpreted and discussed based on theories (doctrine) and legal principles and regulations relating to the subject matter.

Keywords: Problem, suspect, arrest

ABSTRAK

Mochamad Nur Saefudin. 201720252007. Permasalahan Penangkapan Diduga Pelaku Terorisme Oleh Densus 88 Di Tinjau Dari Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.15 tahun 2003.

Tujuan penulis meneliti mengenai permasalahan penangkapan diduga pelaku terorisme oleh Densus 88 ditinjau dari UU No 5 tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 15 tahun 2003, adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan kebijakan criminal (criminal policy) dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penanggulangannya perlu dibuat aturan khusus (*lex specialis*).

Permasalahan yang timbul dalam upaya paksa penangkapan yang di lakukan oleh Densus 88, sangat berkaitan erat dengan faktor-faktor yang disampaikan menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor Perundang-undangan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilita, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Perundang-undangan tindak pidana terorisme UU No.15 tahun 2003 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme, dianggap sudah tidak relevan dengan masanya sehingga pemerintah malakukan pembaharuan dengan disahkannya undang-undang baru yaitu UU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No 15 tahun 2003. Untuk meminimalisir pelanggaran prosedur penangkapan terduga pelaku terorisme, ada beberapa usaha yang di lakukan pemerintah salah satunya dengan pembaharuan perundang-undangan, dan menegakan aturan hukum terhadap aparat yang melakukan pelanggaran prosedur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Kata Kunci : Permasalahan, terduga, penangkapan